

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), salah satu bahan yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lain yang menjadi Prioritas Pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 7 Seri A);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 12 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 adalah menjabarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang meliputi rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 adalah :

- 1) Menyiapkan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2014.
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- 3) Sebagai dasar tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum yang telah dilaksanakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum. Visi Dinas Pekerjaan Umum adalah "*Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang*" dengan Misi (1) Menunjang terwujudnya jaringan jalan provinsi yang berkelanjutan melalui mobilitas, aksesibilitas dan keselarasan yang memadai, guna melayani pusat-pusat kegiatan Nasional, Provinsi, Wilayah dan Kawasan strategis Nasional dan Provinsi. (2) Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Kabupaten/Kota meningkat dalam menyelenggarakan jalan melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas. (3) Menyediakan system jaringan Sumber Daya Air yang terpadu melalui jaringan irigasi, sumber air baku, sungai (saluran banjir), rawa serta pengamanan abrasi pantai. (4) Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulant dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergitas dan konektivitas Kota dan Desa berbasis potensial lokal. (5) Mewujudkan Tata Ruang yang nyaman, aman, Produktif dan terkendali.

Pencapaian kinerja sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**Realisasi Belanja Langsung dari Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012**

No	Uraian	APBD Perubahan (Rp)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Anggaran	
				(Rp)	%	(Rp)	%
	BELANJA LANGSUNG	270,735,705,698.06	100.00	196,545,850,791.00	72.60	74,189,854,907.06	27.40
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,603,260,000.00	100.00	1,365,050,906.00	85.14	238,209,094.00	14.86
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	100.00	2,970,000.00	99.00	30,000.00	1.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224,000,000.00	100.00	172,148,560.00	76.85	51,851,440.00	23.15
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	66,000,000.00	100.00	56,400,000.00	85.45	9,600,000.00	14.55
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	244,400,000.00	100.00	238,961,000.00	97.77	5,439,000.00	2.23
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	76,400,000.00	100.00	73,795,500.00	96.59	2,604,500.00	3.41
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75,000,000.00	100.00	74,941,000.00	99.92	59,000.00	0.08
7	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	35,000,000.00	100.00	34,793,000.00	99.41	207,000.00	0.59
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	100.00	14,695,500.00	97.97	304,500.00	2.03
9	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	20,000,000.00	100.00	12,960,000.00	64.80	7,040,000.00	35.20
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,500,000.00	100.00	14,116,500.00	91.07	1,383,500.00	8.93

11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	30,000,000.00	100.00	29,868,000.00	99.56	132,000.00	0.44
12	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	669,210,000.00	100.00	521,790,200.00	77.97	147,419,800.00	22.03
13	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)	129,750,000.00	100.00	117,611,646.00	90.64	12,138,354.00	9.36
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,792,515,000.00	100.00	5,403,525,500.00	61.46	3,388,989,500.00	38.54
14	Pembangunan Perkantoran Kwarda Pramuka Prov. Kep. Bangka Belitung	4,000,000,000.00	100.00	3,645,799,000.00	91.14	354,201,000.00	8.86
15	Penyusunan DED Gedung Kantor	2,668,700,000.00	00.00	00.00	00.00	2,668,700,000.00	100.00
16	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	546,500,000.00	100.00	504,690,000.00	92.35	41,810,000.00	7.65
17	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	73,900,000.00	100.00	72,465,000.00	98.06	1,435,000.00	1.94
18	Pengadaan Panel Listrik Kantor Dinas Pekerjaan Umum	189,550,000.00	-	-	-	189,550,000.00	100.00
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	202,400,000.00	100.00	198,099,900.00	97.88	4,300,100.00	2.12
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	247,715,000.00	100.00	182,708,600.00	73.76	65,006,400.00	26.24
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	863,750,000.00	100.00	799,763,000.00	92.59	63,987,000.00	7.41
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	337,475,000.00	100.00	323,513,712.00	95.86	13,961,288.00	4.14
22	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	171,850,000.00	100.00	165,183,062.00	96.12	6,666,938.00	3.88

23	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	165,625,000.00	100.00	158,330,650.00	95.60	7,294,350.00	4.40
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	166,250,000.00	100.00	163,708,000.00	98.47	2,542,000.00	1.53
24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	166,250,000.00	100.00	163,708,000.00	98.47	2,542,000.00	1.53
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	2,149,150,000.00	100.00	1,927,943,100.00	89.71	221,206,900.00	10.29
25	Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	1,511,800,000.00	100.00	1,506,800,000.00	99.67	5,000,000.00	0.33
26	Penyusunan Laporan Kegiatan dan Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan	637,350,000.00	100.00	421,143,100.00	66.08	216,206,900.00	33.92
VI	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	190,574,799,698.06	100.00	131,381,173,073.00	68.94	59,193,626,625.06	31.06
27	Perencanaan Pembangunan Jalan	499,860,000.00	100.00	496,803,800.00	99.39	3,056,200.00	0.61
28	Pembangunan Jalan	25,540,150,000.00	100.00	23,986,690,300.00	93.92	1,553,459,700.00	6.08
29	Pembangunan Jalan	825,450,000.00	100.00	810,810,800.00	98.23	14,639,200.00	1.77
30	Pembangunan Jalan (DAK + Pendamping DAK)	8,809,060,000.00	100.00	8,807,369,900.00	99.98	1,690,100.00	0.02
31	Perencanaan Pembangunan Jembatan	7,001,150,000.00	100.00	6,594,580,900.00	94.19	406,569,100.00	5.81
32	Pembangunan Jembatan Kolong Kepoh	2,887,640,000.00	100.00	2,675,480,500.00	92.65	212,159,500.00	7.35

33	Pembangunan Jembatan Batu Rusa II	143,412,689,698.06	100.00	86,477,888,873.00	60.30	56,934,800,825.06	39.70
34	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1,598,800,000.00	100.00	1,531,548,000.00	95.79	67,252,000.00	4.21
VII	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	799,395,000.00	100.00	664,651,550.00	83.14	134,743,450.00	16.86
35	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	799,395,000.00	100.00	664,651,550.00	83.14	134,743,450.00	16.86
VII I	Program Rehabilitasi/Peeliharaan Jalan dan Jembatan	39,974,350,000.00	100.00	35,866,231,350.00	89.72	4,108,118,650.00	10.28
36	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	39,974,350,000.00	100.00	35,866,231,350.00	89.72	4,108,118,650.00	10.28
IX	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	500,000,000.00	100.00
37	Inspeksi Kondisi Jalan	500,000,000.00	00.00	00.00	00.00	500,000,000.00	100.00
X	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	755,350,000.00	100.00	449,396,000.00	59.50	305,954,000.00	40.50
38	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	458,550,000.00	100.00	449,396,000.00	98.00	9,154,000.00	2.00
39	Pembuatan Legar Jalan Provinsi	296,800,000.00	00.00	00.00	00.00	296,800,000.00	100.00
XI	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	11,336,591,000.00	100.00	9,659,276,350.00	85.20	1,677,314,650.00	14.80
40	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	1,707,000,000.00	100.00	1,676,065,850.00	98.19	30,934,150.00	1.81
41	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	584,680,000.00	100.00	535,565,800.00	91.60	49,114,200.00	8.40

42	Optimalisasi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Kabupaten Bangka	1,350,000,000.00	100.00	1,174,442,350.00	87.00	175,557,650.00	13.00
43	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	224,180,000.00	100.00	122,591,200.00	54.68	101,588,800.00	45.32
44	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	407,400,000.00	100.00	391,100,000.00	96.00	16,300,000.00	4.00
45	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Kab. Bangka Selatan dan Kab. Belitung Timur (DAK + Pedamping DAK)	7,063,331,000.00	100.00	5,759,511,150.00	81.54	1,303,819,850.00	18.46
XII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	1,651,800,000.00	100.00	1,513,691,200.00	91.64	138,108,800.00	8.36
46	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah	599,700,000.00	100.00	585,763,000.00	97.68	13,937,000.00	2.32
47	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	1,052,100,000.00	100.00	927,928,200.00	88.20	124,171,800.00	11.80
XII I	Program Pengendalian Banjir	3,004,740,000.00	100.00	2,284,637,400.00	76.03	720,102,600.00	23.97
48	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali	3,004,740,000.00	100.00	2,284,637,400.00	76.03	720,102,600.00	23.97
XI V	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	4,240,000,000.00	100.00	4,110,346,000.00	96.94	129,654,000.00	3.06
49	Pembangunan Dermaga	2,000,000,000.00	100.00	1,934,420,000.00	96.72	65,580,000.00	3.28
50	Pembangunan Dermaga Nelayan Laut Kelapa Kampit	1,350,000,000.00	100.00	1,295,159,000.00	95.94	54,841,000.00	4.06

51	Rehabilitasi Dermaga Pulau Seliu Kecamatan Membalong	890,000,00 0.00	100. 00	880,767,0 00.00	98. 96	9,233,000. 00	1.0 4
XV	Program Pengelolaan Area Pemakaman	3,133,190, 000.00	00. 00	83,428,50 0.00	2.6 6	3,049,761 ,500.00	97. 34
52	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	3,133,190, 000.00	00.0 0	83,428,50 0.00	2.6 6	3,049,761, 500.00	97. 34
XV I	Program Pengembangan Perumahan	490,870,0 00.00	100. 00	451,958,0 00.00	92. 07	38,912,00 0.00	7.9 3
53	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	490,870,00 0.00	100. 00	451,958,0 00.00	92. 07	38,912,00 0.00	7.9 3
XV II	Program Perencanaan Tata Ruang	1,130,800, 000.00	100 .00	855,546,5 50.00	75. 66	275,253,4 50.00	24. 34
54	Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	830,800,00 0.00	100. 00	634,706,9 00.00	76. 40	196,093,1 00.00	23. 60
55	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	300,000,00 0.00	100. 00	220,839,6 50.00	73. 61	79,160,35 0.00	26. 39
XV III	Program Pemanfaatan Ruang	95,170,00 0.00	100 .00	41,773,60 0.00	43. 89	53,396,40 0.00	56. 11
56	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang	95,170,000 .00	100. 00	41,773,60 0.00	43. 89	53,396,40 0.00	56. 11
Jumlah Belanja Langsung		270,735,7 05,698.06	100. 00	196,545,8 50,791.00	72. 60	74,189,85 4,907.06	27. 40

Pada Tahun 2012, Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 259.508.650.698,06-, (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Nol Enam Rupiah). Pada APBD Perubahan tahun 2012, Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penambahan sebesar Rp.

11.227.055.000,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total keseluruhan 270.735.705.698,06 (Dua Ratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Koma Nol Enam Rupiah). Sedangkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 196.545.850.791,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Tabel 2
Indikator Capaian Kinerja
Tahun 2012

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan jasa surat menyurat			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya perangkat, materai dan benda pos lainnya	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya Umur Rencana Jalan			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	<u>Keluaran</u>			
	Rekening telepon dan listrik beserta penambahan daya PLN	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya rekening telpon dan listrik kantor			
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya administrasi keuangan kantor			

4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Terjaganya kebersihan kantor			
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			
	<u>Keluaran</u>			
	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tercapainya kelancaran peralatan kerja			
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya ATK yang dapat melayani administrasi Kantor			
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat melayani administrasi perkantoran			
8	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya lampu pijar dan kabel listrik	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya penerangan bangunan kantor			

9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya surat kabar/majalah untuk mencari informasi			
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya isi tabung gas dan dispenser	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya isi tabung gas dan dispenser			
11	Penyediaan Makanan dan Minuman			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu			
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			
	<u>Keluaran</u>			
	Meningkatnya kinerja melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya kinerja untuk menunjang administrasi perkantoran			
13	Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung)			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya operasional rutin kantor UPTD	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya operasional rutin kantor UPTD			

14	Pembangunan Perkantoran Kwarda Pramuka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 paket	1 paket	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya Kinerja Aparatur			
15	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			
	<u>Keluaran</u>			
	Kendaraan dinas			
	<u>Hasil</u>	2 unit roda 4	2 unit roda 4	100%
	Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur			
16	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya meubelair	18 unit	18 unit	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya meubelair yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dinas PU			
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			
	<u>Keluaran</u>			
	Terpeliharanya satu unit gedung kantor	1 unit	1 unit	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatkan kinerja pelayanan aparatur			
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya biaya untuk perawatan rutin kendaraan dinas/operasional	1 paket	1 paket	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya biaya untuk perawatan rutin kendaraan dinas/operasional			

19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			
	<u>Keluaran</u>			
	Terehabilitasinya 5 unit gedung kantor	5 unit	5 unit	100%
	<u>Hasil</u>			
	-			
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya pakaian dinas			
	<u>Hasil</u>	1 paket	1 paket	100%
	Tersedianya pakaian dinas pegawai Dinas PU			
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya pakaian dinas	1 paket	1 paket	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya pakaian dinas Dinas PU			
22	Pendidikan dan pelatihan formal			
	<u>Keluaran</u>			
	Meningkatkan kinerja aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel	1 paket	1 paket	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatkan kinerja aparatur Dinas PU Prov. Kep. Babel			
23	Pengendalian Manajemen pengadaan barang dan jasa			
	<u>Keluaran</u>			
	Terlaksananya pengendalian manajemen pengadaan barang dan jasa	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa			

24	Penyusunan laporan kegiatan dan terbentuknya unit layanan pengadaan (ULP)			
	<u>Keluaran</u>			
	Terbentuknya ULP dan tersusunnya laporan kegiatan	12 bulan	12 bulan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Adanya ULP dan tersusunnya laporan kegiatan			
25	Perencanaan pembangunan Jalan			
	<u>Keluaran</u>			
	Desain Pembangunan Jalan			
	<u>Hasil</u>	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jalan			
26	Pembangunan jalan			
	<u>Keluaran</u>			
	Tertingkatnya Ruas Jalan Provinsi			
	<u>Hasil</u>	25,71 km	15,41 km	60%
	Meningkatnya Kondisi Konstruksi Jalan			
27	Pembangunan jalan			
	<u>Keluaran</u>			
	Tertingkatnya Ruas Jalan Provinsi			
	<u>Hasil</u>	1,99 km	1,99 km	100%
	Meningkatnya Kondisi Konstruksi Jalan			
28	Pembangunan Jalan (DAK + Pendamping DAK)			
	<u>Keluaran</u>			
	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan			
	<u>Hasil</u>	5 km	5 km	100%
	Meningkatnya Kondisi Konstruksi Jalan			

29	Perencanaan pembangunan jembatan			
	<u>Keluaran</u>			
	Desain Pembangunan Jembatan			
	<u>Hasil</u>	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Meningkatnya Kualitas Konstruksi Jembatan			
30	Pembangunan jembatan kolong keboh			
	<u>Keluaran</u>			
	Terbangunnya Jembatan			
	<u>Hasil</u>	1 jembatan	1 jembatan	100%
	Meningkatnya Kondisi Konstruksi Jembatan			
31	program pembangunan jalan dan jembatan batu rusa II			
	<u>Keluaran</u>			
	Terbangunnya Jembatan batu rusa II			
	<u>Hasil</u>	1 jembatan	1 jembatan	60%
	Meningkatnya Kondisi Konstruksi Jembatan			
32	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			
	<u>Keluaran</u>			
	Termonitoringnya Pembangunan Jalan dan Jembatan			
	<u>Hasil</u>	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Terbangunnya Jalan dan Jembatan yang Sesuai dengan Spesifikasi			
33	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			
	<u>Keluaran</u>			
	Terbangunnya talud penahan abrasi	220 M	220 M	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya kinerja bidang SDA			

34	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan			
	<u>Keluaran</u>			
	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan			
	<u>Hasil</u>	Ef : 25,00 Km	25 Km	100%
	Meningkatnya kondisi konstruksi jalan			
35	Penyusunan sistem informasi/ data base jalan			
	<u>Keluaran</u>			
	Inventarisasi Jalan Provinsi			
	<u>Hasil</u>	31,60 Km	31,60 Km	100%
	Terinventarisir Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Provinsi			
36	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi			
	<u>Keluaran</u>			
	Terlaksananya Rehabilitasi saluran pembuang	2.700 M	2.700 M	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya hasil pertanian			
37	Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun Kab. Bangka			
	<u>Keluaran</u>			
	Terlaksananya jaringan irigasi	630 M	630 M	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi			
38	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			
	<u>Keluaran</u>			
	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan SDA	1 laporan	1 laporan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya kinerja bidang SDA			

39	Pemberdayaan petani pemakai air			
	<u>Keluaran</u>			
	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi D.I Gusung dan D.I Kimak	325 Ha	325 Ha	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya hasil pertanian			
40	Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun Kab. Bangka Selatan dan Kab. Belitung Timur (DAK + Pedamping DAK)			
	<u>Keluaran</u>	Rehab saluran : 9.000 M	Rehab saluran : 9.000 M	100%
	Terlaksananya jaringan irigasi	Rehab jalan : 12.650 M	Rehab jalan : 12.650 M	
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi			
41	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya jaringan air minum	1 paket	1 paket	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tercapainya jaringan air minum untuk kebutuhan masyarakat			
42	Pengembangan sistem distribusi air minum			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya jaringan air minum	1 paket	1 paket	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tercapainya jaringan air minum untuk kebutuhan masyarakat			

43	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali			
	<u>Keluaran</u>			
	Terbangunnya saluran pembuang (banjir)	8 Km	8 Km	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya fungsi saluran pembuang (banjir)			
44	Pembangunan Dermaga			
	<u>Keluaran</u>			
	Pembangunan dermaga pulau gersik Belitung	1 unit	1 unit	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur			
45	Pembangunan Dermaga Nelayan Laut Kelapa Kampit			
	<u>Keluaran</u>			
	terbangunnya dermaga nelayan laut	1 unit	1 unit	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur			
46	Rehabilitasi Dermaga Pulau Seliu Kecamatan Membalong			
	<u>Keluaran</u>			
	terehabnya dermaga pilau seliu kecamatan Membalong	1 unit	1 unit	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur			
47	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman			
	<u>Keluaran</u>			
	Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman	2 paket	2 paket	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya pengelolaan area pemakaman			

48	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan			
	<u>Keluaran</u>			
	Terintegrasinya program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Meningkatnya pengelolaan area perumahan			
49	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang			
	<u>Keluaran</u>			
	Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi kawasan strategis dan cepat tumbuh	3 laporan	3 laporan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Aparatur Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi kawasan strategis dan cepat tumbuh			
50	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan			
	<u>Keluaran</u>			
	Laporan tata guna tanah sepanjang jalan lintas timur	1 laporan	1 laporan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersedianya laporan tata guna tanah sepanjang jalan lintas timur			
51	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang			
	<u>Keluaran</u>			
	Laporan data informasi evaluasi kinerja bidang ke-PU an	1 laporan	1 laporan	100%
	<u>Hasil</u>			
	Tersusunnya laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke-PU an			
52	Normalisasi saluran sungai			
	<u>Keluaran</u>			
	teratasinya banjir	14,72 Km	14,72 Km	100%
	<u>Hasil</u>			
	Lancarnya pengaliran air ke sungai			

2.2. Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 tahun 2008 Tentang Uraian tugas Dinas pekerjaan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- b. Bidang Tata Ruang, Bina Program dan pengendalian;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, hubungan masyarakat dan tata laksana organisasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan peloporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan sumber daya manusia, administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga kantor, penyusunan peraturan, perundang-undangan, dokumentasi serta kepastakaan;
- c. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta penyelenggaraan inventarisasi rumah tangga kantor dan Pembinaan jasa kontruksi;
- d. pelaksanaan pembinaan Staf;
- e. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

c. Sub bagian Perlengkapan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran kantor, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, adalah sebagai berikut :

- 1) membuat program kerja Sub Bagian Keuangan;
- 2) memimpin dan mengkoordinasi tugas Staf yang ada dibawah pengawasan Sub Bagian Keuangan;
- 3) membantu Sekretariat Dinas dalam bidang tugasnya;
- 4) melakukan urusan - urusan administrasi keuangan sesuai dengan perundang - undangan;
- 5) menyiapkan bahan - bahan dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar isian Kegiatan (DIK);
- 6) melaksanakan pembukuaan keuangan belanja rutin secara sistematis sesuai dengan peraturan undang - undangan;
- 7) menyusun Daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayaran;
- 8) mengurus Keuangan Perjalanan Dinas Pegawai, Datasering, Biaya Pindah Pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), Pencairan Upah Pungut I Uang Perangsang, Biaya Operasional dan Penyelesaian;
- 9) mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Bendaharawan rutin / Gaji/ Pembangunan;
- 10) melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretariat Dinas tentang langkah - langkah dan tindakan - tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- 12) menyusun laporan pelaksanaan Sub Bagian Keuangan setiap akhir tahun;

- 13) melaksanakan pembinaan Staf;
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor serta pengelolaan inventarisasi dan pembinaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas, Perjalanan Dinas;
- c. merencanakan kebutuhan alat - alat tulis kantor dan menyusun petunjuk penggunaan / peruntukannya ;
- d. melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- e. melakukan pemeliharaan ruangan dan perkarangan kantor;
- f. mengurus pengadaan pakaian Dinas / Perlengkapan Dinas Pegawai;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- h. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- i. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti, urusan mutasi pegawai baru serta tindakan disiplin pegawai;
- j. menyiapkan pengajuan / usulan dan pengiriman pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang akan diikutsertakan dalam penataan dan latihan, pendidikan penjenjangan baik di dalam maupun di Luar Negeri;
- k. menyusun dan melaporkan penyelenggaraan daftar hadir pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;

- l. melaksanakan pembinaan Staf;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan inventarisasi kekayaan milik Negara;

Uraian tugas Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggaraan administrasi barang inventaris dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, dan perawatan sampai dengan penghapusan inventaris;
- b. mengelolah administrasi perlengkapan;
- c. membuat kartu inventaris barang (KIB) setiap ruangan;
- d. memberi kode dan nomor inventaris;
- e. mencatat kode dan nomor barang-barang kedalam buku kerja;
- f. membuat kartu inventaris kendaraan milik Negara;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan setiap 3 bulan dan pada akhir tahun kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- h. menginventarisasi gedung kantor, rumah dinas, surat tanah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- i. melaksanakan pembinaan Staf;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tata Ruang, Bina Program Dan Pengendalian

Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penetapan program, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program sub-sub dinas untuk pengembangan wilayah provinsi sesuai sasaran, merencanakan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam pengembangan wilayah terpadu baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian mempunyai Fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, tata ruang kota dan daerah pada wilayah yang menjangkau lebih dari satu daerah Kabupaten /Kota;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan/ pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan melalui penataan kawasan;
- c. penyusunan perencanaan umum jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan pembangunan system prasarana dan sarana dalam bidang prasarana wilayah, perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air;
- d. pengevaluasian pelaporan, pengkajian data dan monitoring dalam bidang prasarana wilayah, perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air;
- e. pelaksanaan Pembinaan Staf;
- f. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang;
- b. Seksi Survey, Pendataan, Perencanaan dan Program;
- c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang, Bina Program dan Pengendalian.

Seksi Tata Ruang

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penataan ruang Provinsi, Kabupaten/kota secara terpadu;

Uraian tugas Seksi Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan RTRW yang telah dibuat oleh masing-masing Kabupaten/ Kota dan data-data yang berkaitan dengan Tata Ruang;
- b. mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
- c. memfasilitasi kegiatan-kegiatan Tata Ruang yang dilaksanakan oleh pusat;
- d. menyebarluaskan informasi-informasi tentang Tata Ruang;
- e. mengawasi/mengelola teknik dari kegiatan-kegiatan instansi yang meminta bantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum;
- f. melaksanakan pembinaan Staf pada Seksi Tata Ruang;
- g. membuat laporan-laporan kegiatan-kegiatan;
- h. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Survey, Pendataan, Perencanaan dan Program

Seksi Survey, Pendataan, Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan survey, pendataan, penelitian, penyelidikan, perencanaan dan mengkoordinasikan perencanaan masing-masing Sub Dinas dalam rangka penyusunan program jangka panjang, jangka menengah serta program tahunan dan menyusun prioritas umum bidang pengembangan prasarana dan sarana wilayah, perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air.

Uraian tugas survey, pendataan, perencanaan dan program adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Pra Survey pada perencanaan awal;
- b. melaksanakan Survey pada pendataan awal;
- c. merumuskan hasil pendataan berupa Penelitian, Penyelidikan dan Perencanaan Umum;
- d. menyempurnakan hasil rumusan, pengembangan Prasarana wilayah, Perkotaan dan Perdesaan, Perumahan dan Permukiman dan Sumber Daya Air;

- e. mengadakan bantuan Survey dan Pendataan pada Proyek - proyek kedinasan lain yang membutuhkan;
- f. membantu atasan langsung maupun Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang berhubungan dengan ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- g. melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi perencanaan masing - masing Sub Dinas dalam rangka menyusun program jangka panjang, jangka menengah serta program tahunan serta Pengendalian Pembangunan Sistem Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Cipta Karya;
- h. membuat perencanaan kerja yang mengacu pada Poperda / Restrada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- i. menyusun, membuat perencanaan anggaran lima tahunan;
- j. membuat program - program / perencanaan tahunan;
- k. membuat laporan kegiatan - kegiatan;
- l. memberikan saran dan masukan kepada Kepala bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Evaluasi dan Pengendalian

Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas menghimpun, menyusun, mengkaji dan mengevaluasi serta menyampaikan laporan / pembangunan fisik dan keuangan kegiatan dan sarana dan prasarana dasar bidang prasarana wilayah, perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman dan sumber daya air;

Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun, menyusun, mengkaji;
- b. mengevaluasi serta menyampaikan laporan fisik dan keuangan proyek Prasarana dan Sarana Dasar;
- c. monitoring kegiatan - kegiatan di bidang Pekerjaan Umum;
- d. membantu atasan langsung maupun Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari - hari yang berhubungan dengan ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
- e. melaksanakan laporan -laporan kegiatan;

- f. memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan teknis rencana pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan prasarana irigasi, rawa, sungai, danau, pantai, dan pengelolaan Sumber Air Baku (PSAPB).

Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, perencanaan teknis di bidang irigasi, rawa, sungai, danau, pantai, dan sumber air baku (PSAPB).
- b. pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air serta sumber air;
- c. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana irigasi, rawa, sungai, danau, pantai dan Sumber air baku (PSAB).
- d. pemantauan dan Evaluasi manfaat serta dampak prasarana sumber air tersebut;
- e. pelaksanaan pembinaan Staf;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknik;
- b. Seksi Irigasi, rawa, Operasi dan Pemeliharaan;
- c. Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengendalian Air Baku.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Seksi Perencanaan Teknis

seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis dan pengembangan irigasi dan rawa, serta menetapkan perencanaan teknis penanganan sungai, pantai, danau, dan Sumber Air Baku;

Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan survey Investigasi Design untuk pengembangan Daerah Irigasi, Daerah rawa, Penanganan dan Pengendalian Banjir, Daerah Aliran Sungai, Penanganan Pantai dan Pengembangan Sumber Air Baku.
- b. melaksanakan Perencanaan teknis, DED dan Perhitungan Enginer Estimate untuk pekerjaan pengembangan Daerah Irigasi, Daerah Rawa, Penanganan Pantai dan Pengembangan Sumber Air Baku;
- c. membuat laporan Kegiatan - kegiatan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Irigasi, rawa, Operasi dan Pemeliharaan

Seksi Irigasi, rawa, Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian pada pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sungai, danau, pantai dan sumber air baku;

Uraian tugas Seksi Irigasi, Rawa, Operasi dan Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa;
- b. membuat laporan Kegiatan - kegiatan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidangnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengelolaan Sumber Air Baku

Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengelolaan Sumber Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian pada pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sungai, danau, pantai dan sumber air baku;

Uraian tugas Seksi Sungai, Pantai, Danau dan Pengelolaan Sumber Air Baku adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan, pembangunan, rehabilitasi sungai, danau, pantai dan sumber air baku;
- b. membuat laporan-laporan kegiatan ;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidangnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas penyusunan program pembinaan, pengembangan prasarana transportasi jalan nasional, jalan provinsi dan transportasi antar moda.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis dan pengembangan prasarana transportasi;
- b. pengaturan teknis dan pelaksanaan pembangunan jalan nasional, jalan provinsi dan jembatan;
- c. penataan prasarana jalan mendukung transportasi barang dan jasa dari satu sarana transportasi dan transportasi lain ke outlet/ pelabuhan dan daerah pemasaran;
- d. pelaksanaan pembinaan Staf;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan, dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;

- b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyusun rencana teknis, pengumpulan data, leger jalan dan jembatan, evaluasi serta menyiapkan rencana pengembangan prasarana transportasi ;

Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknik, Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan survey data jalan dan jembatan;
- b. menyusun spesifikasi umum, teknik pokok pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan;
- t. menyusun leger jalan, Stafus, nomor dan fungsi jalan;
- g. melaksanakan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
- h. menyusun data laporan kondisi jalan dan jembatan;
- i. menyiapkan rencana pengembangan dan prasarana jalan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan Negara maupun jalan provinsi.

Uraian tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, Rehabilitasi Pemeliharaan jalan dan Jembatan;
- b. melaksanakan pengawasan rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan

Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan mempunyai tugas mengadakan pengujian material dan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, serta mengatur peralatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;

Uraian tugas Seksi Peralatan dan Pengujian Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengujian terhadap bahan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan uji petik terhadap pengawasan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. mengatur penggunaan peralatan;
- d. menyusun daftar inventaris peralatan;
- e. menyusun laporan kondisi dan penggunaan peralatan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan pengembangan penataan ruangan perkotaan, permukiman dan pengelolaan bangunan prasarana lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis dibidang perkotaan, permukiman dan bangunan serta prasarana lingkungan (air bersih dan sanitasi);
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, permukiman, pengembangan

permukiman, pengembangan jaringan jalan kota dan jalan lingkungan serta pembangunan dan pengembangan air bersih dan sanitasi;

- c. penataan pengelolaan gedung kantor dan rumah negara;
- d. pelaksanaan pembinaan Staf;
- e. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Perkotaan dan Perdesaan;
- b. Seksi Perumahan dan Permukiman;
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air bersih.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Seksi Perkotaan dan Perdesaan

Seksi Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan, perkotaan dan perdesaan, pengembangan jaringan jalan kota dan perdesaan.

Uraian tugas Seksi Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan dibidang jalan perkotaan dan perdesaan;
- b. melaksanakan / rehabilitasi jalan dan jembatan perkotaan dan perdesaan;
- c. memonitor dan mengevaluasi kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. melaksanakan pembinaan Staf;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat pelaporan dibidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Perumahan dan Permukiman

- (1) Seksi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pekerjaan perumahan dan permukiman, mengelola nilai bangunan serta penataan dan pengelolaan gedung rumah Negara.
- (2) Uraian tugas Seksi Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan bidang perumahan dan permukiman perdesaan;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan sektor perumahan dan permukiman perkotaan perdesaan;
 - c. melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan pembinaan Staf;
 - f. melaksanakan evaluasi dan membuat pelaporan dibidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan air bersih dan sanitasi, mengadakan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penggunaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, menyusun rencana teknis dan program pengembangan perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman serta air bersih dan penyehatan lingkungan;

Uraian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan permukiman dan air Bersih mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kebutuhan air bersih perkotaan perdesaan;
- b. melaksanakan kegiatan penyediaan air bersih perkotaan dan perdesaan;

- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. melaksanakan evaluasi dan membuat pelaporan dibidang tugasnya;
- e. merencanakan dan melaksanakan penyehatan lingkungan permukiman dalam rangka mencapai rumah sehat;
- f. mensosialisasikan penggunaan prasarana dan sarana yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum;
- g. melaksanakan pembinaan Staf;
- h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan dibidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ahlinya;

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit kerja masing-masing;

Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Ruang, Bina Program dan pengendalian;

- d. Bidang Sumber Daya Air;
- e. Bidang Bina Marga;
- f. Bidang Cipta Karya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi perangkat daerah ditunjuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dimana UPTD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 1 yaitu di Tanjung pandan untuk menangani kegiatan yang berada di wilayah Belitung.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Untuk menjalankan kegiatannya Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai fungsi sebagai:

- Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pekerjaan Umum.
- Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pekerjaan umum.
- Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum.
- Pembinaan unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan kepala daerah yaitu tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, dan merupakan tahap kedua pada pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025.

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut adalah *"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera"*, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek yang berbasis potensi local serta pemantapan imtaq;
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance);

4. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; dan
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Adapun Visi adalah Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah: "*Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan*".

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, yaitu:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan /kecamatan /kabupaten / kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014 adalah

1. Mewujudkan konektivitas antar wilayah dengan menyediakan infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas penduduk dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi
2. Mendorong terciptanya konektivitas regional trans Bangka Belitung untuk mendukung mobilitas ekonomi antar pulau
3. Menunjang aksesibilitas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan jalan untuk memenuhi konektivitas dan sinergitas Desa-Kota
4. Menyelenggarakan pembangunan jaringan Sumber Daya Air yang terpadu untuk menciptakan ketersediaan dan pengendalian Sumber Daya Air
5. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan
6. Membangun pola ruang yang sudah direncanakan serta mengendalikan struktur, pola ruang dan mendorong terbangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota dan perdesaan.

Sasaran rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah

1. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan

- pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya
2. Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan jalan trans Bangka Belitung
 3. Menyiapkan fasilitas bagi Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelenggarakan pembangunan jalan
 4. Membangun sumber daya air , jaringan irigasi, mengembangkan sumber air baku, baik rawa maupun sungai serta membangun pengaman abrasi pantai
 5. Sarana dan prasarana permukiman menjadi lebih sehat dan bersih, sehingga terjadi sinergitas permukiman antara kawasan perkotaan dan perdesaan dan dapat menjadi pendorong kreatifitas ekonomi local
 6. Implementasi dan pengembangan rencana yang terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Kawasan serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan perdesaan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2014 adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - b. Penyediaan jasa surat menyurat
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - k. Penyediaan Makanan dan Minuman

- l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - m. Operasional unit pelaksanaan kegiatan PIP2B
 - n. Operasional laboratorium Bina Marga
 - o. Operasional alat berat Dinas Pekerjaan Umum
 - p. Pembinaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (PNPM-PMK)
 - q. Penyediaan Jasa keamanan Kantor
 - r. Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum di Belitung
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan gedung workshop Pekerjaan Umum
 - c. DED pengembangan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - d. Pembangunan kantor UPTD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pembangunan kantor perwakilan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - c. Pelatihan dan sertifikasi tukang
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Pengendalian manajemen pengadaan barang dan jasa
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan ke PU-an
 - c. Penyusunan harga satuan upah dan bahan
5. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - a. Pembangunan jalan di lingkungan kawasan kota baru Air Anyir
6. Program perencanaan tata ruang
 - a. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
 - b. Pelatihan aparat pemerintah tentang aplikasi GIS dan penggunaan GPS

- c. Survey lokasi dalam pembuatan rencana detail kawasan
 - d. Koordinasi antar pemerintah daerah dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan terpadu
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - a. Pengadaan Arm Roll sampah kota Pangkalpinang
 - b. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
 8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
 9. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
 - a. Pembangunan jalan perdesaan
 - b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 10. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - a. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah di bangun
 11. Program pembangunan system informasi/data base jalan dan jembatan
 - a. Penyusunan sistem informasi/data base jalan
 12. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - a. Pembangunan gedung workshop
 - b. Pemberdayaan petani pemakai air
 - c. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 13. Program pengendalian banjir
 - a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
 14. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai
 - a. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
 15. Program pembangunan jalan dan jembatan
 - a. Pembangunan jalan
 - b. Pembangunan jembatan
 - c. Perencanaan pembangunan jalan
 - d. Perencanaan penyusunan data base jembatan provinsi

16. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
17. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
18. Program lingkungan sehat perumahan
 - a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
19. Program pemanfaatan ruang
 - a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTRW di kabupaten/kota
20. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - a. Pembuatan legar jalan provinsi
21. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - a. Pengadaan alat-alat berat
 - b. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
22. Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
 - a. Pengadaan alat survey kerataan jalan (Naasra)
23. Program kerjasama pembangunan antar daerah
 - a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
 - b. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
 - c. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
24. Program pembangunan turap/talud/bronjong
 - a. Pembangunan turap/talud/bronjong
25. Program pengembangan perumahan
 - a. Penyusunan data base perumahan

Tabel 3

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2014**

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

NAMA PROGRAM/KEGIATAN, TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN		JUMLAH DANA
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		5,000,000,000
Pembangunan jalan di lingkungan kawasan Kota Baru Air Anyir		5,000,000,000
<i>Tujuan</i>	Meningkatnya akses jalan di lingkungan kawasan kota baru air anyir	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersedianya Infrastruktur jaringan jalan di wilayah kota baru air anyir	
Program perencanaan tata ruang		3,650,000,000
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan		3,000,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersusunnya hasil kajian teknis kawasan	
<i>Indikator Sasaran</i>	Memberikan manfaat terhadap stakeholder terkait dalam penyusunan peraturan zonasi	
Pelatihan aparat pemerintah tentang aplikasi GIS dan penggunaan GPS		350,000,000
<i>Tujuan</i>	Meningkatnya kemampuan aparat pemerintah tentang aplikasi GIS dan penggunaan GPS	
<i>Indikator Sasaran</i>	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang	
Survey lokasi dalam pembuatan rencana detail kawasan		200,000,000
<i>Tujuan</i>	Memberikan hasil kajian yang dapat menjadi acuan prioritas dalam pembuatan dan penyusunan RDTRK	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersusunnya data base dalam pelaksanaan penataan ruang	
Koordinasi antar pemerintah daerah dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan terpadu		100,000,000
<i>Tujuan</i>	Rapat koordinasi pembahasan internal unsur pemerintah Provinsi/kabupaten/kota dalam rangka proses penyusunan rencana tata ruang kawasan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
<i>Indikator Sasaran</i>	Laporan Proseding kegiatan	
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		2,400,000,000
Pengadaan arm roll sampah kota pangkalpinang		1,500,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersedianya alat angkut sampah	
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah		900,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya kebijakan manajemen pengelolaan persampahan	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersedianya SOP persampahan	

NAMA PROGRAM/KEGIATAN, TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN		JUMLAH DANA
Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah		4,500,000,000
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah		4,500,000,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan	
<i>Indikator Sasaran</i>	Dokuman perencanaan jalan	
Program pembangunan infrastruktur perdesaan		8,192,500,000
Pembangunan jalan perdesaan		8,125,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya infrastruktur jaringan jalan di kawasan strategis (KTM, Agropolitan, dan minapolitan)	
<i>Indikator Sasaran</i>	Terbukanya akses dari dan ke kawasan tersebut sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		67,500,000
<i>Tujuan</i>	Laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an pelaksanaan PPIP	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersusunnya laporan akhir data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an pelaksanaan PPIP	
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya		17,426,956,000
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun		15,100,000,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Meningkatnya fungsi jaringan	
Pemberdayaan petani pemakai air		1,200,000,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Meningkatnya hasil pertanian	
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		1,126,956,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya rehabilitasi saluran pembuang	
<i>Indikator Sasaran</i>	Swasembada pangan melalui peningkatan hasil pertanian	
Program Pengendalian banjir		7,713,468,900
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali		7,713,468,900
<i>Tujuan</i>	Terbangunnya saluran pembuang (banjir)	
<i>Indikator Sasaran</i>	Meningkatnya fungsi saluran pembuang (banjir)	
Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai		6,000,000,000
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya		6,000,000,000
<i>Tujuan</i>	Terpeliharanya embung dan bangunan penampung air lainnya	
<i>Indikator Sasaran</i>	Terpenuhinya kebutuhan terhadap air baku	

NAMA PROGRAM/KEGIATAN, TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN		JUMLAH DANA
Program pembangunan jalan dan jembatan		252,530,000,000
Pembangunan jalan		134,430,000,000
<i>Tujuan</i>	Meningkatnya pembangunan jalan provinsi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Membuka akses baru menunjang perekonomian dan memperlancar arus lalu lintas	
Pembangunan jembatan		116,400,000,000
<i>Tujuan</i>	Terbangunnya jembatan baru	
<i>Indikator Sasaran</i>	Memperlancar arus lalu lintas	
Perencanaan pembangunan jalan		1,000,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya dokumen kajian peningkatan status jalan dan dokumen perencanaan data base jalan provinsi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Mengetahui kajian peningkatan jalan status jalan provinsi menjadi jalan nasional	
Perencanaan penyusunan data base jembatan provinsi		700,000,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya pembangunan drainase	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersedianya dokumen perencanaan jembatan	
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		62,640,700,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan		62,640,700,000
<i>Tujuan</i>	Terpeliharanya jalan provinsi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Meningkatnya kondisi konstruksi jalan	
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		1,200,000,000
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan		1,200,000,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya pembangunan drainase	
<i>Indikator Sasaran</i>	Meningkatkan fungsi saluran drainase	
Program pemanfaatan ruang		150,000,000
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RTRW di Kab/Kota		150,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya dana pendampingan PPIP	
<i>Indikator Sasaran</i>	Memperlancar kegiatan PPIP	
Program pembangunan system informasi/data base jalan dan jembatan		400,000,000
Pembuatan legar jalan provinsi		400,000,000
<i>Tujuan</i>	Inventarisasi jalan provinsi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Terinventarisasi jalan dan bangunan pelengkap jalan provinsi	

NAMA PROGRAM/KEGIATAN, TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN		JUMLAH DANA
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		6,000,000,000
Pengadaan alat-alat berat		5,000,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya alat berat di DPU	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersedianya alat berat yang dapat meningkatkan kinerja di DPU	
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan		1,000,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium di DPU	
<i>Indikator Sasaran</i>	Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium yang dapat meningkatkan kinerja di DPU	
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan		750,000,000
Pengadaan alatsurvey kerataan jalan (Naasra)		750,000,000
<i>Tujuan</i>	Teridentifikasinya kondisi jalan	
<i>Indikator Sasaran</i>	Database mengenai kondisi jalan di Prov. Kep. Babel	
Program kerjasama pembangunan		425,000,000
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah		150,000,000
<i>Tujuan</i>	Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi usulan kegiatan (forum SKPD dan forum Binamarga)	
<i>Indikator Sasaran</i>	Terlaksananya usulan kegiatan kab/kota dan mensinkronkan kegiatan antar kab/kota dengan provinsi	
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga		150,000,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya forum jasa konstruksi di Prov. Kep. Babel	
<i>Indikator Sasaran</i>	Pemerintah daerah dapat mengatasi masalah yang terjadi di dalam jasa konstruksi	
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah		125,000,000
<i>Tujuan</i>	Terlaksananya koordinasi tim Pembina jasa konstruksi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Koordinasi tim Pembina jasa konstruksi	
Program pembangunan turap/talud/bronjong		3,740,000,000
Pembangunan turap/talud/bronjong		3,740,000,000
<i>Tujuan</i>	Terbangunnya talud penahan abrasi	
<i>Indikator Sasaran</i>	Mengurangi abrasi di pantai	
Program pengembangan perumahan		200,000,000
Penyusunan database perumahan		200,000,000
<i>Tujuan</i>	Tersedianya database perumahan	
<i>Indikator Sasaran</i>	Terinventarisirnya data perumahan	
Jumlah urusan wajib Dinas Pekerjaan umum		382,918,674,900

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

